



LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

*DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan petunjuk, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022.

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk laporan tahunan sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan kepada pemberi wewenang, yaitu Pemerintah Kota Samarinda. Laporan kinerja tahunan ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Samarinda selama tahun 2022.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja tahunan yang disusun ini masih terdapat kekurangan, mengingat terbatasnya kemampuan kami. Oleh karena itu, segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan. Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas kita sekalian.

Samarinda, 20 Februari 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Landasan Hukum 2

 C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda 4

 D. Aspek Strategis Organisasi 14

 E. Sistematika Laporan 21

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 22

 A. Rencana Strategis 22

 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 24

 C. Program dan Kegiatan 36

 B. Perjanjian Kinerja..... 44

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 45

 A. Pengukuran Kinerja 45

 B. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2022 45

 1. Analisis Target dan Realisasi Capaian IKU 2022 46

 2. Analisis Realisasi Kinerja Utama 2021 dan tahun 2022 47

 3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi 49

 4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 53

 C. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan 2022..... 61

BAB IV PENUTUP 76

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Tenaga PNS dan Non PNS	15
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon.....	15
Tabel 1.3	Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat.....	15
Tabel 1.4	Alokasi Pembiayaan Kesehatan.....	16
Tabel 1.5	Luas Wilayah Tiap Kecamatan dan Keberadaan Puskesmas di Kota Samarinda 2022.....	19
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022.....	24
Tabel 2.2	Keterkaitan Sasaran Strategis, IKU, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	25
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	36
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	44
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2022.....	47
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	47
Tabel 3.3	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	49
Tabel 3.4	Alokasi Anggaran Indikator Kinerja.....	53
Tabel 3.5	Alokasi dan Realisasi Anggaran dalam Rangka Pencapaian IKU.....	53
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2022	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai salah satu azas umum dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari laporan kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

B. Landasan Hukum

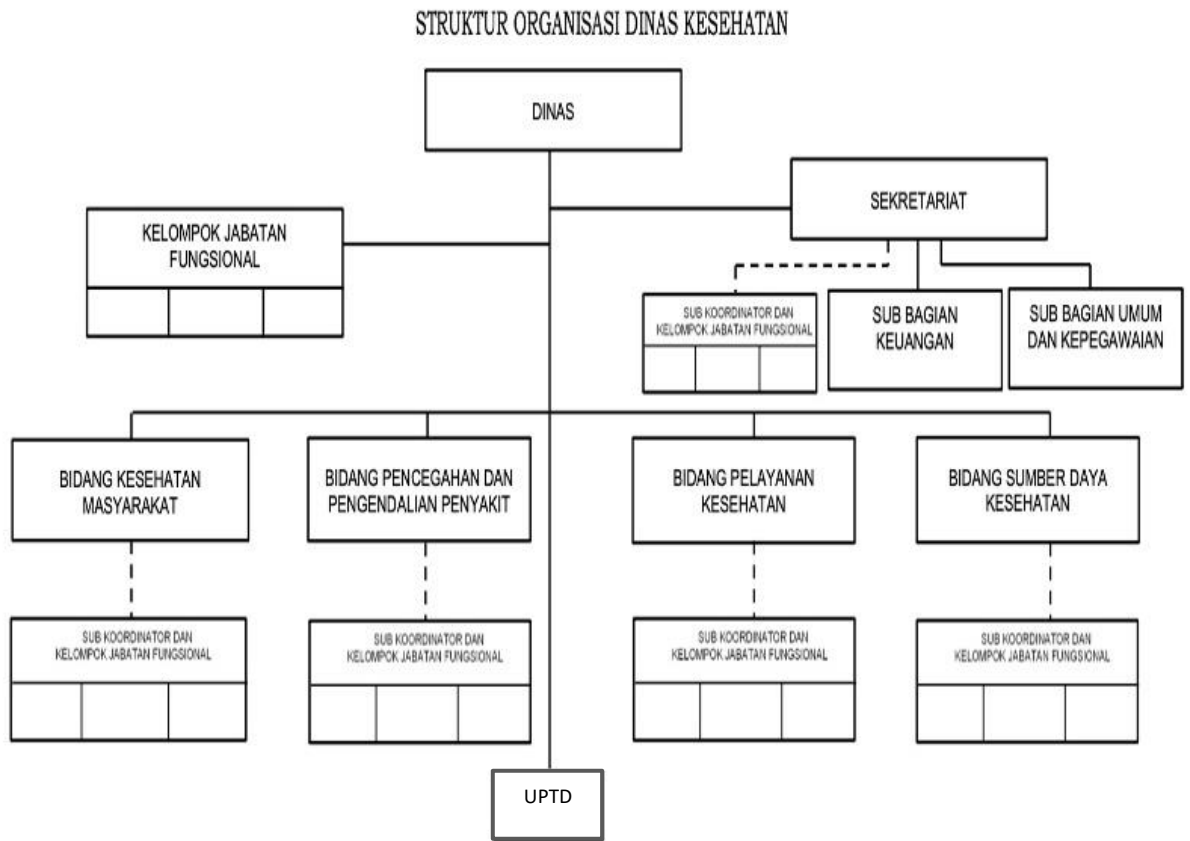
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Dinas Kesehatan merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda berdasarkan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Beberapa ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD



C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Samarinda

1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kota

- Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kota

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dinas mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan bidang kesehatan;
- perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan;
- d. Penerbitan izin bidang kesehatan;
- e. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan;
- g. Pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan;
- h. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kepegawaian, urusan rumah tangga dinas, keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan dan pengelolaan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- c. Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Fungsi Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
- f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran dinas dan penerimaan dinas/retribusi;

- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- i. pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
- j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas dan fungsi dinas;
- n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada dinas;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- c. mengoordinasikan penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;
- d. memeriksa/meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. melaksanakan verifikasi SPP;
- f. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan dinas;
- g. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);
- h. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- i. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- j. menyusun neraca keuangan dinas;

- k. mengoordinasi dan meneliti anggaran perubahan dinas;
- l. menyusun laporan keuangan dinas;
- m. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan ketatausahaan;
- c. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor, dan pengelolaan inventarisasi barang;
- g. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang daerah dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- i. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non-struktural dan fungsional;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui *website* maupun permintaan data langsung;
- n. menyusun tatalaksana dan standar pelayanan penanganan pengaduan dan

pemberian informasi, melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan; memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

- o. membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan tugas dan fungsi;
- b) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- a. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan kebijakan, bahan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan dan penyusunan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- d) penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- e) penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- f) penyiapan rencana kegiatan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;

- g) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h) pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan wabah/klb;
- i) penurunan angka kesakitan dan kematian penyakit potensial wabah;
- j) pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- d) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;

- e) pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kesehatan tradisional serta registrasi fasilitas pelayanan kesehatan;
- f) pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- a. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
- b. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- e) pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- f) pembuatan laporan hasil dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

- g) pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- h) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dikoordinasi oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda terdapat UPTD yang terdiri dari :

- a. UPTD Instalasi Farmasi Kelas A;
- b. UPTD berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) meliputi:
 - 1) UPTD Puskesmas Trauma Center Kelas A;
 - 2) UPTD Puskesmas Air Putih Kelas A;
 - 3) UPTD Puskesmas Baqa Kelas A;
 - 4) UPTD Puskemas Bengkuring Kelas A;
 - 5) UPTD Puskemas Juanda Kelas A;
 - 6) UPTD Puskemas Karang Asam Kelas A;
 - 7) UPTD Puskemas Lempake Kelas A;
 - 8) UPTD Puskemas Loa Bakung Kelas A;
 - 9) UPTD Puskemas Mangkupalas Kelas A;
 - 10) UPTD Puskemas Palaran Kelas A;
 - 11) UPTD Puskemas Pasundan Kelas A;

- 12) UPTD Puskemas Remaja Kelas A;
- 13) UPTD Puskemas Sambutan Kelas A;
- 14) UPTD Puskemas Segiri Kelas A;
- 15) UPTD Puskemas Sempaja Kelas A;
- 16) UPTD Puskemas Sidomulyo Kelas A;
- 17) UPTD Puskemas Sungai Siring Kelas A;
- 18) UPTD Puskemas Temindung Kelas A;
- 19) UPTD Puskemas Wonorejo Kelas A;
- 20) UPTD Puskemas Sungai Kapih Kelas A;
- 21) UPTD Puskemas Harapan Baru Kelas A;
- 22) UPTD Puskemas Makroman Kelas A;
- 23) UPTD Puskemas Bukuan Kelas A;
- 24) UPTD Puskemas Bantuas Kelas A;
- 25) UPTD Puskemas Samarinda Kota Kelas A; dan
- 26) UPTD Puskemas Lok Bahu Kelas A

c. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas dalam pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah yang meliputi pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan pelayanan uji laboratorium sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan manajemen kesehatan yang diarahkan Kepala Dinas yang searah dengan kebijakan umum daerah, serta melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
- d. pelayanan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik meliputi pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi

- klinik, patalogi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan;
- e. pelayanan pemeriksaan di bidang laboratorium non-klinik meliputi pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
 - f. melaksanakan kegiatan pemantapan mutu internal dan eksternal;
 - g. penerapan teknologi pada laboratorium kesehatan;
 - h. pemeliharaan peralatan laboratorium;
 - i. melaksanakan K-3 (kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja) di laboratorium dan mengelola limbah laboratorium sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
 - k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Gambaran sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Samarinda cukup memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Seluruh Puskesmas mempunyai tenaga medis, tenaga kebidanan, sarjana kesehatan masyarakat, ahli gizi, tenaga perawat gigi, tenaga laboratorium, dan asisten apoteker. Namun, untuk tenaga apoteker jauh masih kurang dan sangat diperlukan khususnya pada pelayanan Puskesmas 24 jam atau Puskesmas rawat inap. Sampai saat ini, tenaga PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda berjumlah 808

orang dan tenaga Non-PNS sebanyak 476 orang sehingga total seluruhnya mencapai 1.284 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Tenaga PNS dan Non-PNS
Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2022

No	Tenaga	Jumlah
1.	PNS	808
2.	Non PNS	476
Jumlah		1.284

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Kesehatan Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Eselon	L	P	Jumlah
1	II	1	0	1
2	III	1	4	5
3	IV	1	1	2

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk mendukung kegiatan pelaksanaan operasional pelayanan kesehatan, didukung dengan sarana dan prasarana. Distribusi fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Samarinda dapat dilihat pada daftar tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Distribusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
di Kota Samarinda

No.	Pelayanan Kesehatan	Total
1	Rumah Sakit Umum	10
2	Rumah Sakit Khusus	6
3	Puskesmas Perawatan	6
4	Puskesmas Non-Perawatan	20
5	Balai Pengobatan/Klinik	100
6	Polindes	4
7	Posyandu	693

3. Pembiayaan Kesehatan

Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis diperoleh dari beberapa sumber pembiayaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Alokasi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kota Samarinda Tahun 2021-2022

No	Jenis Sumber Pembiayaan	Jumlah Alokasi	
		2021	2022
1	APBD Kota	316.538.901.840	365.844.399.798
2	APBD Provinsi	-	-
3	APBN (DAK Fisik/Non Fisik)	42.053.119.290	22.909.753.750
Total Alokasi Pembiayaan Kesehatan		358.592.021.130	388.754.153.548

4. Aspek Wilayah

Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Asal mula Kota Samarinda dimulai pada sekitar tahun 1668, Sultan yang dipertuan Kerajaan Kutai memerintahkan Pua Ado bersama pengikutnya yang asal tanah Sulawesi membuka perkampungan di Tanah Rendah. Pembukaan perkampungan ini dimaksud Sultan Kutai, sebagai daerah pertahanan dari serangan bajak laut asal Filipina yang sering melakukan perampokan di berbagai daerah pantai wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara. Perkampungan tersebut oleh Sultan Kutai diberi nama Sama Rendah. Sama Rendah dimaksudkan agar semua penduduk, baik asli maupun pendatang berderajat sama. Tidak ada perbedaan antara penduduk bersuku Bugis, Kutai, Banjar, dan suku lainnya. Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarendah atau lama-kelamaan ejaannya berubah menjadi Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 Kota Samarinda hanya terdiri dari 4 kecamatan yang kemudian pada tahun 1997 dimekarkan menjadi 6 kecamatan, terdiri dari 42 kelurahan. Jumlah kelurahan

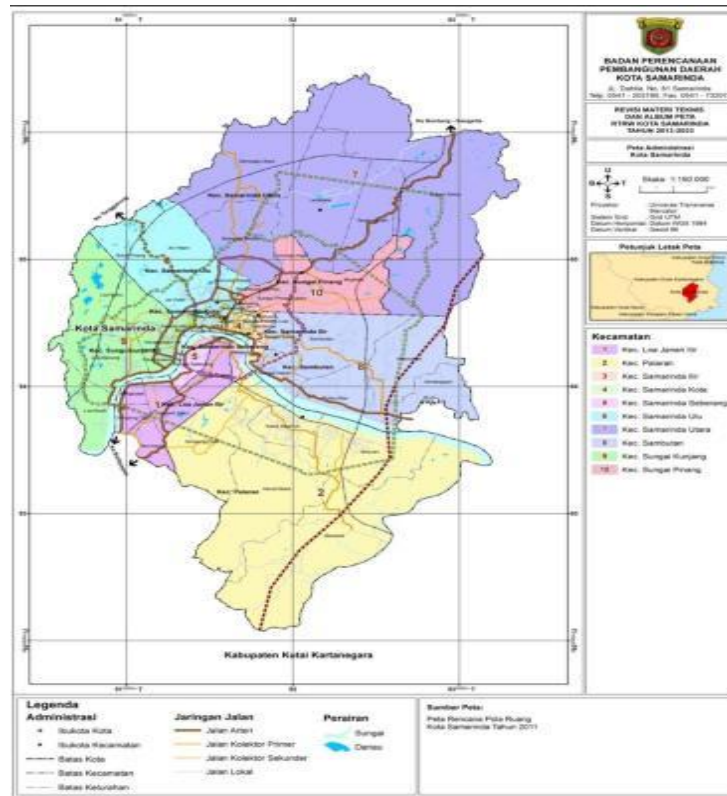
terus bertambah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kota Samarinda dan mengacu pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan 11 Kelurahan Baru Hasil dari Pemecahan/Pemekaran dalam Wilayah Kota Samarinda, maka jumlah kelurahan setelah pemekaran menjadi 53 kelurahan. Akibat jumlah penduduk yang terus meningkat dan untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir, yang membagi Kota Samarinda menjadi 10 kecamatan dengan 59 kelurahan seiring dengan terbentuknya Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Tenun Samarinda, Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, dan Kelurahan Budaya Pampang.

Secara geografis, Kota Samarinda terletak pada posisi 0o 21' 18'' - 1o 09' 16'' LS dan 116o 15' 16'' - 117 24' 16'' BT. Kota Samarinda terbelah oleh Sungai Mahakam, dan memiliki luas wilayah 718 km². Dengan luas wilayah tersebut Kota Samarinda merupakan daerah kota terbesar di antara tiga daerah kota yang ada di Kalimantan Timur. Secara administratif, seluruh wilayah Kota Samarinda berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara baik bagian utara, timur, selatan, maupun barat.

Adapun batas administrasi Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Badak (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Timur : Kecamatan Anggana dan Sanga-sanga (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Selatan: Kecamatan Loa Janan (Kutai Kartanegara)
- Sebelah Barat : Kecamatan Muara Badak dan Tenggarong Seberang (Kutai Kartanegara)

Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Samarinda



Wilayah administrasi Kota Samarinda terdiri dari 10 kecamatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kecamatan Palaran
2. Kecamatan Samarinda Seberang
3. Kecamatan Loa Janan Ilir
4. Kecamatan Sungai Kunjang
5. Kecamatan Samarinda Ulu
6. Kecamatan Samarinda Kota
7. Kecamatan Samarinda Ilir
8. Kecamatan Sambutan
9. Kecamatan Samarinda Utara
10. Kecamatan Sungai Pinang

Penyebaran Puskesmas di setiap kecamatan di Kota Samarinda merata. Kondisi persebaran Puskesmas di Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5
Luas Wilayah Tiap Kecamatan dan Keberadaan Puskesmas
di Kota Samarinda 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Kelurahan	Jumlah Puskesmas
1	Palaran	221,29	5	3
2	Samarinda Seberang	12,49	6	2
3	Loa Janan Ilir	26,13	5	2
4	Sungai Kunjang	43,04	7	4
5	Samarinda Ulu	22,12	8	4
6	Samarinda Kota	11,12	5	1
7	Samarinda Ilir	17,18	5	1
8	Sambutan	100,95	5	3
9	Samarinda Utara	229,52	8	4
10	Sungai Pinang	34,16	5	2
JUMLAH		718.00	59	26

5. Analisis Aspek Strategis

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Samarinda dengan tetap memperhatikan kondisi dan tantangan pembangunan bidang kesehatan di Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda 2021-2026. Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebagai unit kerja Pemerintah Kota Samarinda memiliki tugas pokok dan fungsi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Beberapa isu strategis yang dihasilkan untuk mencapai visi misi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu:

a. Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata.

Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau untuk setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dengan mengutamakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promosi kesehatan belum banyak mengubah perilaku

masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

b. Meningkatkan kinerja dan pelayanan.

Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan yang merata dan bermutu. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat, tetapi kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi sehingga menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan sebagai bagian penting dari manajemen kesehatan, data, dan informasi kesehatan merupakan sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan kesehatan, yaitu proses manajemen, pengambilan keputusan, pemerintahan, dan penerapan akuntabilitas.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
- D. Aspek Strategis Organisasi
- E. Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Realisasi Anggaran
- D. Prestasi

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa "*visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan*", maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. "*Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi*. Jadi, misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi.

Ada pun visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 yang telah dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan, yaitu "***TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN***". Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Samarinda dengan tetap memperhatikan kondisi dan tantangan pembangunan bidang kesehatan di Kota Samarinda seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda 2021-2026. Dinas Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang kesehatan berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan sumber daya kesehatan yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan selalu memprioritaskan peningkatan mutu layanan di sarana pelayanan kesehatan khususnya milik pemerintah.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dijabarkan dalam 5 misi, yakni :

1. Mewujudkan Warga Kota yang Religius, Unggul dan Berbudaya
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Bebas Korupsi
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Mantap dan Modern
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni dan Lestari

2. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi maka tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
- b. Terciptanya Pelayanan Prima bagi Masyarakat

3. Sasaran

Sasaran pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya akses Pelayanan Kesehatan secara merata
 - Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk
- b. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, merupakan suatu kewajiban instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama secara formal sesuai level (tingkatan). Ditetapkannya IKU maka akan memudahkan memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi demi perbaikan kinerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,53
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,2

Tabel 2.2
Keterkaitan Sasaran Strategis, IKU, Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	74,37	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
						Pembangunan Puskesmas
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
						Pengadaan Obat, Vaksin
						Pengadaan Bahan Habis Pakai
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
						Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
						Operasional Pelayanan Puskesmas
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respons Wabah
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
						Operasional Pelayanan Rumah Sakit
						Operasional Pelayanan Puskesmas Palaran
						Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
						Operasional Pelayanan Puskesmas Baqa
						Operasional Pelayanan Puskesmas Harapan Baru
						Operasional Pelayanan Puskesmas Trauma Center
						Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Asam
						Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Bakung
						Operasional Pelayanan Puskesmas Juanda
						Operasional Pelayanan Puskesmas Wonorejo
						Operasional Pelayanan Puskesmas Pasundan

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas Segiri
						Operasional Pelayanan Puskesmas Air Putih
						Operasional Pelayanan Puskesmas Remaja
						Operasional Pelayanan Puskesmas Temindung
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sidomulyo
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sambutan
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Kapih
						Operasional Pelayanan Puskesmas Makroman
						Operasional Pelayanan Puskesmas Lempake
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Siring
						Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan
						Operasional Pelayanan Puskesmas Bantuas
						Operasional Pelayanan Puskesmas Bengkuring

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas Lok Bahu
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sempaja
						Operasional Pelayanan Puskesmas Samarinda Kota
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
						Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Mebel
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan		
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

C. Program dan Kegiatan

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Kota Samarinda Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
			Pembangunan Puskesmas
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pengadaan Obat, Vaksin
			Pengadaan Bahan Habis Pakai
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
			Operasional Pelayanan Puskesmas
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Operasional Pelayanan Puskesmas Palaran
			Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
			Operasional Pelayanan Puskesmas Baqa
			Operasional Pelayanan Puskesmas Harapan Baru
			Operasional Pelayanan Puskesmas Trauma Center
			Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Asam
			Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Bakung
			Operasional Pelayanan Puskesmas Juanda
			Operasional Pelayanan Puskesmas Wonorejo
			Operasional Pelayanan Puskesmas Pasundan
			Operasional Pelayanan Puskesmas Segiri
			Operasional Pelayanan Puskesmas Air Putih
			Operasional Pelayanan Puskesmas Remaja
			Operasional Pelayanan Puskesmas Temindung
			Operasional Pelayanan Puskesmas Sidomulyo
			Operasional Pelayanan Puskesmas Sambutan
			Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Kapih
			Operasional Pelayanan Puskesmas Makroman
			Operasional Pelayanan Puskesmas Lempake
			Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Siring

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan
			Operasional Pelayanan Puskesmas Bantuas
			Operasional Pelayanan Puskesmas Bengkuring
			Operasional Pelayanan Puskesmas Lok Bahu
			Operasional Pelayanan Puskesmas Sempaja
			Operasional Pelayanan Puskesmas Samarinda Kota
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari pimpinan instansi/unit kerja penerima amanah dari atasannya langsung untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah atau atasan langsung sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Tujuan perjanjian kinerja adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dari kinerja aparatur.
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima mandat dengan pemberi mandat.
3. Sebagai dokumen penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dari suatu organisasi.
4. Sebagai pedoman tolok ukur kinerja.
5. Sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
6. Sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Samarinda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Akses Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	0,53
2.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,2

Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	219,872,546,284	288,198,760,208
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	95,938,775,556	96,135,627,590
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	437,231,000	2,148,913,500
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	0	241,800,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	290,349,000	2,029,052,250
Jumlah	316,538,901,840	388,754,153,548

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasi, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : sasaran, indikator kinerja, target program dan kegiatan serta anggaran, sedangkan satuan pengukuran kinerja masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk : persentase, orang, rupiah, buah, hari, unit, dan sebagainya.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda, maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan rencana kinerja di awal tahun ditetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
81–100	Tercapai/Berhasil
61–80	Cukup Tercapai/Cukup Berhasil
41–60	Kurang Tercapai/Kurang Berhasil
< 40	Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

B. Capaian Kinerja Indikator Utama (IKU)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan MenPAN dan RB Nomor : PER/09/M.Pan/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda disampaikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022 dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja yang kemudian dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1. Analisis Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan 2022**

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,53	0,50	94,34
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,2	81,03	103,62

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator kinerja pada tahun 2022, yaitu tergolong dalam kriteria "Tercapai/Berhasil". Pada sasaran pertama tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata terdapat indikator kinerja rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk ditargetkan 0,53 dan terealisasi 0,50 atau capaian realisasi 94,34%. Sasaran kedua, yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat terdapat indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian yang ditargetkan pada sasaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebesar 78,2 dan terealisasi 81,03 hasil tersebut berada di atas sasaran yang ditetapkan sehingga capaian realisasinya 103,62%.

2. Analisis Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan 2022 dengan Tahun 2021

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk			0,53	0,50
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			78,2	81,03
3	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	87,00	100	87,10
4	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	95,01	100	93,64
5	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	96,46	100	90,05
6	Pelayanan Kesehatan Balita	100	58,93	100	85,59

No	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	30,36	100	85,57
8	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	15,49	100	61,42
9	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	59,98	100	70,33
10	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	8,48	100	54,48
11	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	80,11	100	98,92
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	96,30	100	99,57
13	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	58,22	100	65,48
14	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Tubuh Manusia/HIV	100	100	100	100
15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	100	100	100	100
16	Perbekalan Sumber Daya Kesehatan	100	100	100	100
17	Cakupan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional	100	100	100	100
18	Prosentase kelurahan yang berperan serta dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	100	100	100	100

Kondisi capaian indikator kinerja tahun ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, hal ini karena perbedaan indikator kinerja tahun 2022 dan tahun 2021. Pada tahun 2022 indikator kinerja Dinas Kesehatan ada 2, yaitu Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sedangkan pada tahun 2021 ada 16 indikator kinerja, yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Tubuh Manusia (HIV), Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan, Perbekalan Sumber Daya

Kesehatan, Cakupan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional dan Persentase Kelurahan yang Berperan Serta dalam Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Dari tabel di atas dapat dilihat 16 indikator pada tahun 2021 dapat dinilai realisasinya, yaitu terdapat penurunan capaian pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar 1,37%. Hal ini disebabkan karena masih sering terjadi keterlambatan proses rujukan ibu bersalin dari faskes tingkat satu ke rumah sakit dan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir mengalami penurunan 6,41% disebabkan karena belum semua jejaring yang mengirimkan laporan kunjungan neonatus dan masih ditemui ibu hamil warga wilayah kerja Samarinda, yang melakukan persalinan dan kunjungan neonatal di luar wilayah domisili.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Perlu Dilakukan

Tabel 3.3
Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Interval Realisasi Kinerja (%)			
					81-100	61-80	41-60	<40
1	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,53	0,5	94,34	√			
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,2	81,03	103,62	√			

1) Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan melakukan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Ada pun fungsinya antara lain sebagai pusat pelayanan kesehatan primer keterjangkauan dan kemudahan akses ke sarana pelayanan kesehatan tersebut sangat diperlukan sebab akan memengaruhi keberhasilan puskesmas dalam melaksanakan fungsinya.

Rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal satu Puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat dilihat secara umum dari indikator rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Jumlah Puskesmas di Kota Samarinda tahun 2022 tercatat sebanyak 26 unit pelaksana teknis daerah. Terdiri dari 20 Puskesmas Non-Rawat Inap dan 6 Puskesmas Rawat Inap. Rasio Puskesmas terhadap penduduk di Kota Samarinda sebesar 1 : 31.970, hal ini masih di bawah target nasional sebesar 1 : 30.000. Rasio ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penambahan dua Puskesmas, hal ini disebabkan laju pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Samarinda lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah Puskesmas di Kota Samarinda. Namun, rasio tersebut bukan merupakan pencapaian yang buruk, mengingat fasilitas kesehatan di Kota Samarinda terus dilengkapi dengan penyediaan rumah sakit dan praktik dokter, sehingga pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat pada Puskesmas dan klinik saja.

2) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Dinas Kesehatan Kota Samarinda melakukan survei untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang telah diberikan. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Di lingkungan Dinas Kesehatan Samarinda terdapat UPTD yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, ada pun hasil survei kepuasan masyarakat sebagai berikut :

No	UPTD	Nilai IKM	Predikat
1	RSUD Ince Abdul Moeis	82,65	Baik
2	Laboratorium Kesehatan Daerah	82,8	Baik
3	Instalasi Farmasi Kesehatan	87,3	Baik
4	Puskesmas Air Putih	82,43	Baik
5	Puskesmas Bantuas	80,18	Baik
6	Puskesmas Baqa	92,73	Sangat Baik
7	Puskesmas Bengkuring	85,7	Baik
8	Puskesmas Bukuan	84,23	Baik
9	Puskesmas Harapan Baru	85,95	Baik
10	Puskesmas Juanda	82,53	Baik
11	Puskesmas Karang Asam	86,23	Baik

No	UPTD	Nilai IKM	Predikat
12	Puskesmas Lempake	86,2	Baik
13	Puskesmas Loa Bakung	84,73	Baik
14	Puskesmas Lok Bahu	84,58	Baik
15	Puskesmas Makroman	81,65	Baik
16	Puskesmas Mangkupalas	83,38	Baik
17	Puskesmas Palaran	78,93	Baik
18	Puskesmas Pasundan	88,28	Baik
19	Puskesmas Remaja	87,65	Baik
20	Puskesmas Samarinda Kota	86,53	Baik
21	Puskesmas Sambutan	77,13	Baik
22	Puskesmas Segiri	90,6	Sangat Baik
23	Puskesmas Sempaja	82,38	Baik
24	Puskesmas Sidomulyo	83,85	Baik
25	Puskesmas Sungai Kapih	80,03	Baik
26	Puskesmas Sungai Siring	96,43	Sangat Baik
27	Puskesmas Temindung	81,23	Baik
28	Puskesmas Trauma Center	87,3	Baik
29	Puskesmas Wonorejo	80,18	Baik

Berdasarkan laporan hasil survei kepuasan di Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebesar 81,03 berada pada kategori "Baik" (pada interval 76,61 s/d 88,30). Ada pun capaian yang diharapkan/target pada sasaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebesar 78,2 dan hasil tersebut berada di atas sasaran yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari 9 unsur pelayanan yang diukur, yaitu:

No	Unsur	Nilai
1	Persyaratan Pelayanan	81,9
2	Prosedur Pelayanan	81
3	Waktu Pelayanan	69,98
4	Biaya/Tarif	93,83
5	Produk Pelayanan	79,88
6	Kompetensi Pelaksana	76,28
7	Perilaku Pelaksana	88,78
8	Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan	98,48
9	Sarana dan Prasarana	75,15

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada tahun 2022 sebesar Rp388.754.153.548 dibandingkan tahun lalu alokasi anggaran mengalami kenaikan. Dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Anggaran dalam pencapaian sasaran pertama tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata dengan indikator kinerja rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk, yaitu sebesar Rp100.555.393.340 dan anggaran dalam pencapaian sasaran kedua meningkatnya kinerja dan pelayanan dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM), yaitu sebesar Rp288.198.760.208 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,53	100.555.393.340
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,2	288.198.760.208
JUMLAH				388.754.153.548

Gambaran distribusi alokasi anggaran untuk setiap indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2022 beserta realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Alokasi dan Realisasi Anggaran dalam Rangka Pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	100.555.393.340	90.323.176.945	89,82
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	288.198.760.208	261.982.812.633	90,90
Total			388.754.153.548	352.305.989.578,26	90,62

Ada pun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai target sasaran strategi tersebut dapat dilihat pada table berikut :

1. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1.1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1.1.1. Penyediaan Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

1.1.1.1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

1.1.1.2. Pembangunan Puskesmas

1.1.1.3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

1.1.1.4. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.1.1.5. Pengadaan Obat, Vaksin

1.1.1.6. Pengadaan Bahan Habis Pakai

1.1.1.7. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.1.1.8. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

1.1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.1.2.1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1.1.2.2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1.1.2.3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

1.1.2.4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

1.1.2.5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

1.1.2.6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

1.1.2.7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

1.1.2.8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

1.1.2.9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

- 1.1.2.10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 1.1.2.11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 1.1.2.12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 1.1.2.13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 1.1.2.14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- 1.1.2.15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 1.1.2.16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 1.1.2.17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 1.1.2.18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 1.1.2.19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- 1.1.2.20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 1.1.2.21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- 1.1.2.22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 1.1.2.23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- 1.1.2.24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 1.1.2.25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 1.1.2.26. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 1.1.2.27. Operasional Pelayanan Puskesmas
- 1.1.2.28. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 1.1.2.29. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 1.1.2.30. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- 1.1.2.31. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

- 1.1.2.32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
- 1.1.2.33. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- 1.1.2.34. Operasional Pelayanan Puskesmas Palaran
- 1.1.2.35. Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
- 1.1.2.36. Operasional Pelayanan Puskesmas Baqa
- 1.1.2.37. Operasional Pelayanan Puskesmas Harapan Baru
- 1.1.2.38. Operasional Pelayanan Puskesmas Trauma Center
- 1.1.2.39. Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Asam
- 1.1.2.40. Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Bakung
- 1.1.2.41. Operasional Pelayanan Puskesmas Juanda
- 1.1.2.42. Operasional Pelayanan Puskesmas Wonorejo
- 1.1.2.43. Operasional Pelayanan Puskesmas Pasundan
- 1.1.2.44. Operasional Pelayanan Puskesmas Segiri
- 1.1.2.45. Operasional Pelayanan Puskesmas Air Putih
- 1.1.2.46. Operasional Pelayanan Puskesmas Remaja
- 1.1.2.47. Operasional Pelayanan Puskesmas Temindung
- 1.1.2.48. Operasional Pelayanan Puskesmas Sidomulyo
- 1.1.2.49. Operasional Pelayanan Puskesmas Sambutan
- 1.1.2.50. Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Kapih
- 1.1.2.51. Operasional Pelayanan Puskesmas Makroman
- 1.1.2.52. Operasional Pelayanan Puskesmas Lempake
- 1.1.2.53. Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Siring
- 1.1.2.54. Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan
- 1.1.2.55. Operasional Pelayanan Puskesmas Bantuas
- 1.1.2.56. Operasional Pelayanan Puskesmas Bengkuring
- 1.1.2.57. Operasional Pelayanan Puskesmas Lok Bahu
- 1.1.2.58. Operasional Pelayanan Puskesmas Sempaja
- 1.1.2.59. Operasional Pelayanan Puskesmas Samarinda Kota
- 1.1.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 1.1.3.1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - 1.1.3.2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

- 1.1.4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1.4.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 1.1.4.2. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 1.1.4.3. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 1.2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1.2.1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1.1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
- 1.3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - 1.3.1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1.3.1.1. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1.3.2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 1.3.2.1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 1.3.3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

- 1.3.3.1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
 - 1.4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 1.4.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4.1.1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1.4.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4.2.1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - 1.4.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.4.3.1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
- 2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan
 - 2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.1.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2.1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 2.1.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 2.1.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 2.1.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 2.1.3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 2.1.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 2.1.4.1. Pengadaan Mebel
 - 2.1.4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.1.5.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2.1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2.1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 2.1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2.1.7. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 2.1.7.1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Beberapa penyebab dari keberhasilan tersebut di atas antara lain :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan Kota Samarinda saling bersinergi.
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target sasaran maupun indikator kinerja pada beberapa seksi berjalan optimal dan tentunya berpengaruh pada tingkat keberhasilan capaian indikator kinerja.

Beberapa faktor penghambat dalam proses pencapaian tersebut antara lain :

1. Peran serta semua elemen pemangku program dan kegiatan yang ada belum optimal, termasuk Puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Belum berprosesnya pohon kinerja, *casecadding* antar-unit belum berjalan maksimal, *cross cutting* OPD yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program kerjanya belum berjalan secara maksimal.

Solusi yang perlu dilakukan dalam upaya perbaikan pada tahun berikutnya antara lain :

1. Sinergitas dalam memahami dan pelaksanaan program dan kegiatan baik di Dinas Kesehatan maupun di tingkat UPTD Dinas Kesehatan lebih ditumbuhkan.
2. Kemampuan dalam penyusunan program dan kegiatan diupayakan lebih aplikatif, tepat guna dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dinas.

C. Realisasi Anggaran

Untuk realisasi anggaran per program tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Per Program Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(% Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
1	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0.53	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	150,000,000	101,655,752	67,77
						Pembangunan Puskesmas	8,971,455,000	8,863,222,940	98,79
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	453,630,000	416,390,000	91,79
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5,499,773,000	5,159,437,431	93,81
						Pengadaan Obat, Vaksin	8,370,094,500	6,227,651,310	74,40
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	5,386,821,356	4,517,355,084	83,86

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(% Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	540,000,000	534,167,098	98,92
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	181,862,000	174,847,000	96,14
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,613,087,150	1,350,422,400	83,72
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	251,271,000	216,511,916	86,17
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	62,114,000	62,113,800	100
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	309,518,900	309,211,350	99,90
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	49,059,000	49,059,000	100
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	29,691,000	27,891,600	93,94

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	352,761,000	340,359,000	96,48
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	46,998,000	46,975,000	99,95
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	35,400,000	35,270,694	99,63
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25,943,000	25,645,000	98,85
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23,640,000	23,640,000	100
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	17,920,000	17,920,000	100
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3,377,154,250	1,010,060,100	29,91

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	132,952,500	98,893,378	74,38
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,707,311,300	2,249,656,750	83,10
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	46,010,000	43,799,800	95,20
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200,000,000	195,724,138	97,86
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60,111,000	60,111,000	100
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	26,039,300	25,974,900	99,75
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1,585,828,000	1,585,482,800	99,98

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	35,235,000	35,178,500	99,84
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1,672,877,393	1,649,600,348	98,61
						Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	18,662,000	18,422,000	98,71
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	62,285,000	62,173,000	99,82
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40,159,776,927	37,947,075,441.83	94,49
						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	159,350,000	159,086,562	99,83
						Operasional Pelayanan Puskesmas	8,383,458,364	7,694,918,877	91,79
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	418,878,350	409,029,298	97,65
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	177,748,200	176,732,950	99,43

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	31,963,000	31,926,000	99,88
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	32,296,000	32,160,000	99,58
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1,081,000,000	874,585,000	80,91
						Operasional Pelayanan Rumah Sakit	49,976,000	47,136,986	94,32
						Operasional Pelayanan Puskesmas Palaran	74,187,000	74,187,000	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas	140,000,000	139,075,000	99,34
						Operasional Pelayanan Puskesmas Baqa	96,570,850	96,570,850	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas Harapan Baru	124,842,500	124,842,500	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas Trauma Center	96,536,600	96,476,600	99,94
						Operasional Pelayanan Puskesmas Karang Asam	128,376,900	128,376,900	100

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
						Operasional Pelayanan Puskesmas Loa Bakung	128,701,400	128,701,400	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas Juanda	113,562,750	113,544,700	99,98
						Operasional Pelayanan Puskesmas Wonorejo	92,454,750	79,284,750	85,76
						Operasional Pelayanan Puskesmas Pasundan	130,448,250	130,448,150	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas Segiri	88,856,900	88,850,400	99,99
						Operasional Pelayanan Puskesmas Air Putih	107,702,000	104,184,000	96,73
						Operasional Pelayanan Puskesmas Remaja	111,899,450	111,721,176	99,84
						Operasional Pelayanan Puskesmas Temindung	116,181,500	113,989,744	98,11
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sidomulyo	112,286,500	108,130,300	96,30
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sambutan	113,491,300	113,242,750	99,78
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Kapih	121,674,250	121,644,250	99,98
						Operasional Pelayanan Puskesmas Makroman	118,231,000	118,231,000	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas Lempake	99,872,700	99,860,700	99,99

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sungai Siring	132,929,000	132,829,000	99,92
						Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan	126,285,000	126,284,900	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas Bantuas	123,619,800	104,419,800	84,47
						Operasional Pelayanan Puskesmas Bengkuring	116,576,750	116,576,750	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas Lok Bahu	64,500,000	64,499,050	100
						Operasional Pelayanan Puskesmas Sempaja	119,652,350	116,044,350	96,98
						Operasional Pelayanan Puskesmas Samarinda Kota	99,562,100	99,562,100	100
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	62,932,500	62,670,905	99,58
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	41,026,000	40,995,500	99,93

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	46,425,000	29,070,000	62,62
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	274,916,000	182,020,293	66,21
						Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	21,375,000	17,025,000	79,65
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2,148,913,500	2,146,407,238	99,88

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13,258,000	0	0
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121,390,000	121,390,000	100

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107,152,000	73,760,500	68,84
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,838,695,250	1,701,091,350	92,52
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	62,694,000	62,693,900	100

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	127,663,000	126,999,935	99,48
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,977,600	33,977,450	100
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,273,000	40,272,900	100
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	123,605,625,742	122,520,122,804	99,12
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17,266,636,000	17,242,673,864	99,86

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34,698,000	34,070,900	98,19
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,998,000	5,981,675	100
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	688,145,000	463,296,843	67,33
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,500,000	8,452,000	99,44
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,900,100	26,467,675	85,66
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,899,850	19,899,800	100
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,050,000	16,033,200	99,90
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,600,000	98,599,581	100

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(% Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	120,000,000	13,400,000	11,17
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	0.00	0
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,612,200,000	3,821,586,373	68,09
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,579,900	46,196,450	41,78
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44,975,000	44,077,500	98,00
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149,848,750	118,043,328	78,77

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program dan Kegiatan			Anggaran	Realisasi	(%) Realisasi
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234,358,000	53,680,000	22,91
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	443,023,000	439,857,150	99,29
					Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	139,634,472,266	116,936,123,139.99	83,74
JUMLAH							388,754,153,548	352,305,989,578.26	90,62

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Samarinda berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada 2022 sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Gambaran keberhasilan nilai capaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Samarinda tahun 2022 adalah Tercapai/Berhasil, dengan nilai interval 81–100 ada 2 indikator, yaitu Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebesar 81,03 berada pada kategori "Baik" (pada interval 76,61 s.d. 88,30). Rasio Puskesmas terhadap penduduk di Kota Samarinda sebesar 1 : 31.970, hal ini masih di bawah target nasional sebesar 1 : 30.000.

Anggaran dalam pencapaian sasaran pertama tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata dengan indikator kinerja rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk, yaitu sebesar Rp100.555.393.340 dan anggaran dalam pencapaian sasaran kedua meningkatnya kinerja dan pelayanan dengan indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM), yaitu sebesar Rp288.198.760.208

Beberapa penyebab dari keberhasilan tersebut di atas antara lain :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan antara bidang dan pengelola program di Dinas Kesehatan Kota Samarinda saling bersinergi.
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target sasaran maupun indikator kinerja pada beberapa seksi berjalan optimal dan tentunya berpengaruh pada tingkat keberhasilan capaian indikator kinerja.

Beberapa faktor penghambat dalam proses pencapaian tersebut antara lain :

1. Peran serta semua elemen pemangku program dan kegiatan yang ada belum optimal, termasuk puskesmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Belum berprosesnya pohon kinerja, Casecadding antar unit belum berjalan maksimal, Cross Cutting OPD yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program kerjanya belum berjalan secara maksimal.

Solusi yang perlu dilakukan dalam upaya perbaikan pada tahun berikutnya antara lain adalah :

1. Sinergitas dalam memahami dan pelaksanaan program dan kegiatan baik di Dinas Kesehatan maupun di tingkat UPT Dinas Kesehatan lebih ditumbuhkan.
2. Kemampuan dalam penyusunan program dan kegiatan diupayakan lebih aplikatif, tepat guna dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dinas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang menggambarkan capaian akuntabilitas kinerja tahun 2023 dibuat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 20 Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541)737606

E-MAIL :up_dkk@yahoo.com

SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

NOMOR 440/315.a/100.02

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP)

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun, agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini bertugas Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2022 di Dinas Kesehatan Kota Samarinda;

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Ketua	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sekretaris	: Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Anggota	: 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	3. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
	4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
	5. Kasubag Keuangan
	6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
	7. Sub. Koordinator Perencanaan dan Program
	8. Pelaksana bagian Perencanaan dan Program

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil kegiatan Tim serta bertanggung jawab kepada Walikota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 24 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. ²⁴H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Bagian Organisasi
4. Inspektorat Kota Samarinda

Manual Prosedur
Pembuatan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)



DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
2022



Manual Prosedur
Pembuatan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Nomor Dokumen	: 400.5.4/ /100.02
Tanggal	: 25 Januari 2023
Diajukan oleh	: Sub Koordinator Program Perencanaan
	 <u>Fransiska Martina</u> NIP.196903131988032002
Disetujui oleh	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda
	 <u>dr. H. Ismid Kusasih</u> NIP.196809111998031009

Daftar Isi

Tujuan	1
Ruang Lingkup	1
Definisi	1
Dasar Hukum	2
Bagan Alur	3
Lampiran	4
1. Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	4
2. Form Penetapan Kinerja	5
3. Form Kertas Kerja	6
4. Form Pengukuran Kinerja	7

Tujuan

Sebagai pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang telah direalisasikan sesuai dengan anggaran dan peraturan pemerintah dalam periode yang ditentukan.

Ruang Lingkup

LAKIP merupakan laporan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah persemester pada tahun anggaran yang berjalan, yang ruang lingkupnya meliputi :

1. Bagian keuangan
2. Sistem dokumen meliputi dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Kertas Kerja dan Pengukuran Kinerja yang dibuat berdasarkan Revisi Fleksibilitas terhadap pagu yang telah ditentukan.

Definisi

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah Pencapaian sasaran strategis unit kerja selama satu tahun berjalan yang dipantau melalui indikator kinerja serta target pencapaian.
2. Penetapan Kinerja adalah Penetapan anggaran masing-masing sasaran strategis unit kerja selama satu tahun berjalan yang disesuaikan dengan target pencapaian.
3. Kertas Kerja adalah Penyesuaian indikator kinerja dari sasaran strategis unit kerja dengan komponen input serta output dan menentukan IKU dan IKK sesuai Renstra.
4. Pengukuran Kinerja adalah Realisasi kinerja yang di capai unit kerja berdasarkan target dan anggaran yang telah di tentukan.
5. Revisi fleksibilitas adalah Penyesuain anggaran belanja tiap unit kerja yang berdasarkan pada pagu yang telah diberikan.
6. LAKIP adalah Laporan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah per semester pada tahun yang berjalan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Bagan Alur

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Sub. Program	Kabid/Kasi/K. UPTD	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan laporan kegiatan (kinerja) dari bidang, UPTD, Bagian dan Seksi lingkup Dinas Kesehatan Kota Samarinda.					Disposisi Surat	1 Minggu	Laporan Kegiatan Tahun Sebelumnya
2	Mengumpulkan Peraturan, Pedoman dan Modul LAKIP, pendukung LAKIP serta data dari bidang dan sekretariat					Laporan Kegiatan Tahun Sebelumnya	2 hari	Juknis, Modul dan Data
3	Penyusunan draft LAKIP Dinas Kesehatan Kota Samarinda					Juknis, Modul dan Data	1 Minggu	Draft Lakip
4	Melakukan rapat pembahasan Draft LAKIP Dinas Kesehatan Kota Samarinda.					Draft Lakip	2 hari	Notulen Rapat/Hasil Pengisian Draft
5	Menyempurnakan draft dan dokumen LAKIP Dinas Kesehatan Kota Samarinda dari hasil rapat pembahasan		Ya			Notulen Rapat/Hasil Pengisian Draft	1 Minggu	Dokumen Lakip Sementara
6	Mengoreksi dokumen LAKIP Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Jika setuju ke Kepala Dinas Kesehatan, jika tidak setuju mengembalikka ke Sub Bagian Program untuk diperbaiki.		Tidak		Ya	Dokumen Lakip Sementara	1 jam	Dokumen Lakip Sementara yang telah diparaf Sekretaris
7	Mengoreksi dokumen LAKIP Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Jika setuju menandatangani, jika tidak setuju mengembalikka ke Sekretaris untuk diperbaiki.			Tidak		Dokumen Lakip Sementara yang telah diparaf Sekretaris	30 menit	Dokumen Lakip Sementara yang telah disetujui Kepala Dinas
8	Menandatangani dokumen LAKIP Dinas Kesehatan Kota Samarinda					Dokumen Lakip Sementara yang telah disetujui Kepala Dinas	15 menit	Dokumen Lakip

Lampiran

1. Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja

2. Form Penetapan Kinerja

Kode	Uraian	Indikator	Target Kinerja	Anggaran

3. Form Kertas Kerja

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran

4. Form Pengukuran Kinerja

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi		
				Target Kinerja	Anggaran	%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022 – 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Target					Penanggung Jawab
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tersedianya Akses Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	rasio	Jumlah Puskesmas/Jumlah Penduduk x 16.000	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	Pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017	78,2	80,3	82,3	82,3	82,3	

Samarinda, 12 Januari 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda


dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
S A M A R I N D A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Ismid Kusasih
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : DR. H. Andi Harun, ST, SH, MSi
Jabatan : WaliKota Samarinda

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 27 Januari 2022

Pihak Kedua
WaliKota Samarinda



DR. H. Andi Harun, ST, SH, MSi.

Pihak Perama
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. H. Ismit Kusasih
NIP 196809111998031009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
DENGAN WALIKOTA SAMARINDA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya akses pelayanan kesehatan secara merata	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,53
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	Nilai IKM	78,2

Program	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 219.872.546.284,-
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 93.019.797.956,-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 437.231.000,-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 290.349.000,-
JUMLAH	Rp 313.619.924.240,-

Samarinda, 27 Januari 2022

Pihak Kedua
Wakil Kota Samarinda



DR. H. Andi Harun, ST, SH, M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. H. Ismed Kusasih
NIP. 196309111998031009



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
S A M A R I N D A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Irama Fitamina**
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 20 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda
DINAS KESEHATAN
24
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kota Samarinda
dr. Irama Fitamina
NIP. 196908152003122004

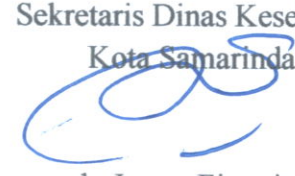
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DINAS

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Akses Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Usia Harapan Hidup	74.37
2.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	IKM	78.2

Program	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 31.977.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 37.273.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 107.807.180.102
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 18.153.219.982
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 34.698.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.998.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 250.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 8.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 24.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 19.899.850
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 16.050.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 98.600.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pengadaan Mebel	Rp 20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 2.076.920.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 5.310.400.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 158.850.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 44.975.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 149.848.750
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 234.358.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 239.798.000
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 85.150.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp 43.422.250
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 41.026.000
Jumlah	Rp 219,956,994,534


 Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda
dr. H. Ismail Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 20 Januari 2022

Sekretaris Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

 dr. Irama Fitamina
NIP. 196908152003122004



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
S A M A R I N D A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Melliyan Agustini, M.Kes**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda


dr. Melliyan Agustini, M.Kes
NIP. 197704272006042008


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
 BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Akses Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Usia Harapan Hidup	74.37

Program	Anggaran
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rp 150.000.000
Pembangunan Puskesmas	Rp 8.971.455.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp 453.630.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Rp 132.952.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp 26.039.300
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 39.504.462.400
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 49.976.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 8.236.518.450
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp 177.748.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Rp 1.081.000.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Rp 46.425.000
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 274.916.000
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp 21.375.000
Jumlah	Rp 59,126,497,850

Samarinda, Januari 2022



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda



dr. Melliayani Agustini, M.Kes
NIP. 197704272006042008



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Hj. Fitriany Madjid
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : dr. H. Ismid Kusasih
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 20 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda
DINAS KESEHATAN
24
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196309111998031009

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

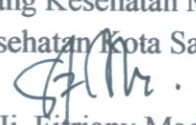

dr. Hj. Fitriany Madjid
NIP. 197012122009112001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Akses Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Usia Harapan Hidup	74.37

Program	Anggaran
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 1.613.087.150
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 251.271.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 62.114.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 309.518.900
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp 352.761.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 2.587.311.300
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 49.059.000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 60.111.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 46.010.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 119.695.000
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp 60.156.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 791.714.950
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 1.838.595.250
Pelaksanaan dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp 62.694.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 127.663.000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 121.390.000
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp 107.152.000
Jumlah	Rp 8,560,403,550


 Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda
dr. H. Isnid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 20 Januari 2022
 Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

 dr. Hj. Fitriany Madjid
 NIP. 197012122009112001



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Siti Nuriyatus Zahrah, MKM**
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Samarinda, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. Siti Nuriyatus Zahrah, MKM
NIP. 197109152002122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1	Tersedianya Akses Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Usia Harapan Hidup	74.37

Program	Anggaran
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 4.970.773.000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 141.862.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 660.574.800
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 2.148.913.500
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 13.258.000
Jumlah	Rp 7,935,381,300

Samarinda, 20 Januari 2022

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda



dr. Siti Nuriyatus Zahrah, MKM
NIP. 197109152002122003



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
S A M A R I N D A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Osa Rafshodia Rafidin, MSCH, MPH, DTM&H**
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 20 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

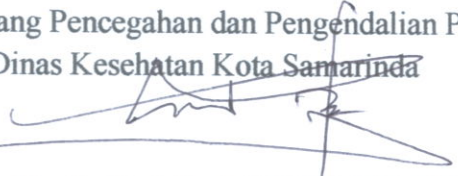
dr. Osa Rafshodia Rafidin, MSCH, MPH, DTM&H
NIP. 197905312008011012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Akses Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Usia Harapan Hidup	74.37

Program	Anggaran
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
Pengadaan Obat, Vaksin	Rp 8.370.094.500
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp 5.386.821.356
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 700.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp 29.691.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 46.998.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp 35.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 25.943.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 23.640.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp 17.920.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 3.377.154.250
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 1.585.827.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp 35.235.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp 42.422.000
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp 18.662.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 62.285.000
Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 628.882.900
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 508.388.600
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 31.963.000
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp 32.296.000
Jumlah	Rp 20,959,624,606


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda
dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

Samarinda, 20 Januari 2022
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. Osa Rafshodia Rafidin, MSCH, MPH, DTM&H
NIP. 197905312008011012



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606

E-MAIL : up_dkk@yahoo.com

SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Ismid Kusasih

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. ANDI HARUN

Jabatan : Walikota Samarinda

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 04 Oktober 2022

Walikota Samarinda

Dr. ANDI HARUN

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

Dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
DENGAN WALIKOTA SAMARINDA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya Akses Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk	0,53
2.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,2

Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 219,872,546,284	Rp 288,198,760,208
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 95,938,775,556	Rp 96,135,627,590
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 437,231,000	Rp 2,148,913,500
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 0	Rp 241,800,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 290,349,000	Rp 2,029,052,250
Jumlah	Rp 316,538,901,840	Rp 388,754,153,548

Wakil Kota Samarinda



Dr. ANDI HARUN

Samarinda, 04 Oktober 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

KERTAS KERJA TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.53	100,555,393,340
	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.53	96,135,627,590
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.54	
	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Faskes	30	30,634,635,856
	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	150,000,000
	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Yang Dibangun	Unit	1	8,971,455,000
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Gedung	69	453,630,000
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	26	5,499,773,000
	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	26	8,370,094,500
	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	27	5,386,821,356
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	26	540,000,000

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	26	181,862,000
	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	100	1,081,000,000
	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jiwa	867.025	65,054,317,234
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.283	1,613,087,150
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15.541	251,271,000
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14.803	62,114,000
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	43.557	309,518,900
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	126.152	49,059,000
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	710.748	29,691,000
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	53.19	352,761,000
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	281.629	46,998,000
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	29.167	35,400,000
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1.182	25,943,000

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	8.3	23,640,000
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	15.583	17,920,000
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kelurahan	59	3,377,154,250
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana	Kelurahan	59	132,952,500
	Jumlah stunting yang tertangani tenaga kesehatan	Jiwa	2006	2,707,311,300
	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Puskesmas	26	46,010,000
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Air Minum berkualitas dan sanitasi	jumlah KK	191.142	200,000,000
	Jumlah pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	33	60,111,000
	jumlah pengumpulan data pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan yankestradkom	Puskesmas	28	26,039,300
	Jumlah Kelurahan yang dilakukan surveilan epidemiologi dan kewaspadaan dini	Kelurahan	59	1,585,828,000
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jiwa	1.182	35,235,000
	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jiwa	1.182	1,672,877,393
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jiwa	576	18,662,000
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jiwa	96.108	62,285,000
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jiwa	38	40,159,776,927

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
	Jumlah Tatanan yang diawasi dan menjadi Tatanan Sehat	Tatanan	7	159,350,000
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Bulan	12	49,976,000
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Bulan	12	8,383,458,364
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Palaran	Jiwa	41.85	74,187,000
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas mangkupalas	Jiwa	30.503	140,000,000
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas baqa	Jiwa	36.431	96,570,850
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas harapan baru	Jiwa	37.869	124,842,500
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Trauma Center	Jiwa	29.833	96,536,600
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas karang asam	Jiwa	33.944	128,376,900
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas loa bakung	Jiwa	39.364	128,701,400
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas juanda	Jiwa	30.513	113,562,750
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas wonorejo	Jiwa	33.269	92,454,750
	Tersedianya masyarakat yang terlayani di Puskesmas pasundan	Jiwa	27.038	130,448,250
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas segiri	Jiwa	39.888	88,856,900
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas air putih	Jiwa	41.472	107,702,000
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Remaja	Jiwa	38.547	111,899,450
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmasn temindung	Jiwa	72.218	116,181,500
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sidomulyo	Jiwa	74.331	112,286,500
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sambutan	Jiwa	26.558	113,491,300
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sungai kapih	Jiwa	14.604	121,674,250
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas makroman	Jiwa	17.103	118,231,000
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas lempake	Jiwa	21.154	99,872,700
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sungai siring	Jiwa	17.214	132,929,000
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bukuan	Jiwa	17.83	126,285,000
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bantuas	Jiwa	4.675	123,619,800

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bengkuring	Jiwa	46.946	116,576,750
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas lok bahu	Jiwa	29.559	64,500,000
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas jalan sempaja	Jiwa	21.88	119,652,350
	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Samarinda Kota	Jiwa	35.445	99,562,100
	Jumlah biaya operasional fasilitas kesehatan lainnya	Unit	6	418,878,350
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Primer Yang Ter-akreditasi	Puskesmas	33	177,748,200
	Jumlah Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Kelurahan	59	31,963,000
	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan respon wabah	Kelurahan	59	32,296,000
	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	Faskes	30	103,958,500
	Jumlah Laporan & data informasi kesehatan	Puskesmas	26	62,932,500
	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	Puskesmas	26	41,026,000
	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit	15	342,716,000
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	13	46,425,000
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di Bina	Rumah Sakit	13	274,916,000
	Jumlah Dokumen Rumusan Rujukan	Dokumen	10	21,375,000
	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Persentase	20	2,148,913,500
	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	Orang	200	2,148,913,500

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
	Jumlah kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar	Orang	677	2,148,913,500
	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya	Persentase	100	241,800,000
	Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	Persentase	15,92	
	Jumlah Izin yang dikeluarkan	Sertifikat	50	13,258,000
	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan ke Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitas Kesehatan	50	13,258,000
	Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	unit	1300	121,390,000
	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi, mendapat sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikat Industri Rumah Rangka Pangan (SPP-IRT)	unit	1300	121,390,000
	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	Unit	100	107,152,000
	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi dan diperiksa	Unit	100	107,152,000

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
	Persentase Murunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	Persentase	11,5	2,029,052,250
	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	Laporan	1	1,838,695,250
	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	Laporan	1	1,838,695,250
	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	Kegiatan	17	62,694,000
	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	Kegiatan	17	62,694,000
	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	Bimtek	2	127,663,000
	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	Bimtek	2	127,663,000
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Nilai	78.2	288,198,760,208
	Nilai IKM	Nilai	78.2	288,198,760,208
	Nilai Akip	Nilai	7,2	74,250,600
	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	5	33,977,600
	Jumlah LAKIP	Dokumen	1	40,273,000
	Jumlah Laporan	Laporan	7	140,906,959,742
	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang	1057	123,605,625,742
	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Orang	888	17,266,636,000

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
	Jumlah Laporan	Laporan	7	34,698,000
	Jumlah laporan	Laporan	8	868,092,950
	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	2	5,998,000
	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	2	688,145,000
	Jumlah peralatan rumah tangga	Buah	20	8,500,000
	Jenis bahan logistik	Paket	20	30,900,100
	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Dokumen	10	19,899,850
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku	2	16,050,000
	Jumlah SPPD	Dokumen	39	98,600,000
	Laporan rencana kebutuhan barang	laporan	158	120,000,000
	Jumlah Pengadaan mebel	Unit	50	120,000,000
	Jumlah sarana dan prasarana gedung	Jenis	50	-
	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	2	5,722,779,900
	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Bukti Pembayaran	87	5,612,200,000
	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bukti Pembayaran	2	110,579,900
	Laporan Pemeliharaan	Laporan	5	872,204,750
	Jumlah Pemeliharaan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Bukti Pembayaran	345	44,975,000
	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	Bukti Pembayaran	345	149,848,750
	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin	Bukti Pembayaran	150	234,358,000

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	Bukti Pembayaran	30	443,023,000
	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	Bulan	12	139,634,472,266
	Terlaksananya Operasional BLUD Fasilitas Kesehatan	Bulan	12	139,634,472,266

Samarinda, 03 Januari 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih
NIP.196809111998031009

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
TAHUN 2022

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.53
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.54
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Faskes	30
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Yang Dibangun	Unit	1
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Gedung	69
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	26
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	26
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	27

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	26
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	26
1 02 02 2.01 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	100
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jiwa	867.025
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.283
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15.541
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14.803
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	43.557

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	126.152
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	710.748
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	53.19
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	281.629
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	29.167
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1.182
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	8.3
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	15.583
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kelurahan	59

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana	Kelurahan	59
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah stunting yang tertangani tenaga kesehatan	Jiwa	2006
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Puskesmas	26
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Air Minum berkualitas dan sanitasi	jumlah KK	191.142
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	33
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	jumlah pengumpulan data pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan yankestradkom	Puskesmas	28
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kelurahan yang dilakukan surveilan epidemiologi dan kewaspadaan dini	Kelurahan	59
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jiwa	1.182
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jiwa	1.182
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jiwa	576

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jiwa	96.108
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jiwa	38
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Bulan	12
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Bulan	12
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Palaran	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Palaran	Jiwa	41.85
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Mangkupalas	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas mangkupalas	Jiwa	30.503
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Baqa	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas baqa	Jiwa	36.431
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Harapan Baru	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas harapan baru	Jiwa	37.869
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Trauma Center	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Trauma Center	Jiwa	29.833
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Karang Asam	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas karang asam	Jiwa	33.944
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Loa Bakung	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas loa bakung	Jiwa	39.364
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Juanda	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas juanda	Jiwa	30.513
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Wonorejo	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas wonorejo	Jiwa	33.269

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Pasundan	Tersedianya masyarakat yang terlayani di Puskesmas pasundan	Jiwa	27.038
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Segiri	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas segiri	Jiwa	39.888
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Air Putih	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas air putih	Jiwa	41.472
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Remaja	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Remaja	Jiwa	38.547
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Temindung	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmasn temindung	Jiwa	72.218
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sidomulyo	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sidomulyo	Jiwa	74.331
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sambutan	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sambutan	Jiwa	26.558
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Kapih	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sungai kapih	Jiwa	14.604
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Makroman	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas makroman	Jiwa	17.103
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lempake	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas lempake	Jiwa	21.154
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Siring	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sungai siring	Jiwa	17.214
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bukuan	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bukuan	Jiwa	17.83
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bantuas	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bantuas	Jiwa	4.675
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bengkuring	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bengkuring	Jiwa	46.946

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lok Bahu	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas lok bahu	Jiwa	29.559
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sempaja	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas jalan sempaja	Jiwa	21.88
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Samarinda Kota	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Samarinda Kota	Jiwa	35.445
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah biaya operasional fasilitas kesehatan lainnya	Unit	6
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Primer Yang Ter-akreditasi	Puskesmas	33
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Kelurahan	59
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan respon wabah	Kelurahan	59
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	Faskes	30
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan & data informasi kesehatan	Puskesmas	26
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	Puskesmas	26
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit	15
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	13

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di Bina	Rumah Sakit	13
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Rumusan Rujukan	Dokumen	10
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Persentase	20
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	Orang	200
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar	Orang	677
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya	Persentase	100
		Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	Persentase	15,92
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin yang dikeluarkan	Sertifikat	50

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan ke Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitas Kesehatan	50
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	unit	1300
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi, mendapat sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikat Industri Rumah Rangka Pangan (SPP-IRT)	unit	1300
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	Unit	100
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi dan diperiksa	Unit	100
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Murunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	Persentase	11,5
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	Laporan	1

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	Laporan	1
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	Kegiatan	17
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	Kegiatan	17
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	Bimtek	2
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	Bimtek	2
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	78.2
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Nilai	7,2
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	5
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP	Dokumen	1
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	7
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang	1057
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Orang	888
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	7

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	8
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	2
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	2
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Buah	20
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	Paket	20
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Dokumen	10
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku	2
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	Dokumen	39
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	laporan	158
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Unit	50
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung	Jenis	50
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	2
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Bukti Pembayaran	87
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bukti Pembayaran	2
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	5
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Bukti Pembayaran	345

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	Bukti Pembayaran	345
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin	Bukti Pembayaran	150
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	Bukti Pembayaran	30
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	Bulan	12
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Fasilitas Kesehatan	Bulan	12

Samarinda, 03 Januari 2022

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 196809111998031009

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2022**

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1 02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				388,754,153,548
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.53	96,135,627,590
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.54	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Faskes	30	30,634,635,856
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	150,000,000
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Yang Dibangun	Unit	1	8,971,455,000
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Gedung	69	453,630,000
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	26	5,499,773,000
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	26	8,370,094,500
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	27	5,386,821,356
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	26	540,000,000

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	26	181,862,000
1 02 02 2.01 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	100	1,081,000,000
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jiwa	867.025	65,054,317,234
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.283	1,613,087,150
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15.541	251,271,000
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14.803	62,114,000
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	43.557	309,518,900
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	126.152	49,059,000
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	710.748	29,691,000
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	53.19	352,761,000

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	281.629	46,998,000
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	29.167	35,400,000
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1.182	25,943,000
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	8.3	23,640,000
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	15.583	17,920,000
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kelurahan	59	3,377,154,250
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana	Kelurahan	59	132,952,500
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah stunting yang tertangani tenaga kesehatan	Jiwa	2006	2,707,311,300
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Puskesmas	26	46,010,000
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Air Minum berkualitas dan sanitasi	jumlah KK	191.142	200,000,000
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	33	60,111,000

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	jumlah pengumpulan data pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan yankestradkom	Puskesmas	28	26,039,300
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kelurahan yang dilakukan surveilan epidemiologi dan kewaspadaan dini	Kelurahan	59	1,585,828,000
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jiwa	1.182	35,235,000
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jiwa	1.182	1,672,877,393
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jiwa	576	18,662,000
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jiwa	96.108	62,285,000
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jiwa	38	40,159,776,927
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Tatanan yang diawasi dan menjadi Tatanan Sehat	Tatanan	7	159,350,000
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Bulan	12	49,976,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Bulan	12	8,383,458,364
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Palaran	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Palaran	Jiwa	41.85	74,187,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Mangkupalas	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas mangkupalas	Jiwa	30.503	140,000,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Baqa	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas baqa	Jiwa	36.431	96,570,850
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Harapan Baru	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas harapan baru	Jiwa	37.869	124,842,500

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Trauma Center	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Trauma Center	Jiwa	29.833	96,536,600
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Karang Asam	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas karang asam	Jiwa	33.944	128,376,900
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Loa Bakung	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas loa bakung	Jiwa	39.364	128,701,400
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Juanda	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas juanda	Jiwa	30.513	113,562,750
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Wonorejo	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas wonorejo	Jiwa	33.269	92,454,750
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Pasundan	Tersedianya masyarakat yang terlayani di Puskesmas pasundan	Jiwa	27.038	130,448,250
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Segiri	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas segiri	Jiwa	39.888	88,856,900
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Air Putih	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas air putih	Jiwa	41.472	107,702,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Remaja	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Remaja	Jiwa	38.547	111,899,450
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Temindung	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmasn temindung	Jiwa	72.218	116,181,500
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sidomulyo	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sidomulyo	Jiwa	74.331	112,286,500
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sambutan	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sambutan	Jiwa	26.558	113,491,300
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Kapih	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sungai kapih	Jiwa	14.604	121,674,250
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Makroman	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas makroman	Jiwa	17.103	118,231,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lempake	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas lempake	Jiwa	21.154	99,872,700
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Siring	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sungai siring	Jiwa	17.214	132,929,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bukuan	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bukuan	Jiwa	17.83	126,285,000

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bantuas	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bantuas	Jiwa	4.675	123,619,800
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bengkuring	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bengkuring	Jiwa	46.946	116,576,750
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lok Bahu	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas lok bahu	Jiwa	29.559	64,500,000
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sempaja	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas jalan sempaja	Jiwa	21.88	119,652,350
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Samarinda Kota	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Samarinda Kota	Jiwa	35.445	99,562,100
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah biaya operasional fasilitas kesehatan lainnya	Unit	6	418,878,350
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Primer Yang Ter-akreditasi	Puskesmas	33	177,748,200
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Kelurahan	59	31,963,000
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan respon wabah	Kelurahan	59	32,296,000
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	Faskes	30	103,958,500
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan & data informasi kesehatan	Puskesmas	26	62,932,500
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	Puskesmas	26	41,026,000
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit	15	342,716,000
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	13	46,425,000
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di Bina	Rumah Sakit	13	274,916,000

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Rumusan Rujukan	Dokumen	10	21,375,000
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Persentase	20	2,148,913,500
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	Orang	200	2,148,913,500
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar	Orang	677	2,148,913,500
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya	Persentase	100	241,800,000
		Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	Persentase	15,92	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin yang dikeluarkan	Sertifikat	50	13,258,000
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan ke Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitas Kesehatan	50	13,258,000

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	unit	1300	121,390,000
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi, mendapat sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikat Industri Rumah Rangka Pangan (SPP-IRT)	unit	1300	121,390,000
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	Unit	100	107,152,000
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi dan diperiksa	Unit	100	107,152,000
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Murunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	Persentase	11,5	2,029,052,250
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	Laporan	1	1,838,695,250
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	Laporan	1	1,838,695,250
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	Kegiatan	17	62,694,000
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	Kegiatan	17	62,694,000

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	Bimtek	2	127,663,000
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	Bimtek	2	127,663,000
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	78.2	288,198,760,208
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Nilai	7,2	74,250,600
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	5	33,977,600
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP	Dokumen	1	40,273,000
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	7	140,906,959,742
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang	1057	123,605,625,742
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Orang	888	17,266,636,000
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	7	34,698,000
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	8	868,092,950
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	2	5,998,000
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	2	688,145,000
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Buah	20	8,500,000
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	Paket	20	30,900,100
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Dokumen	10	19,899,850
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku	2	16,050,000
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	Dokumen	39	98,600,000

Kode	Uraian	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	laporan	158	120,000,000
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Unit	50	120,000,000
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung	Jenis	50	-
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	2	5,722,779,900
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Bukti Pembayaran	87	5,612,200,000
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bukti Pembayaran	2	110,579,900
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	5	872,204,750
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Bukti Pembayaran	345	44,975,000
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	Bukti Pembayaran	345	149,848,750
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin	Bukti Pembayaran	150	234,358,000
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	Bukti Pembayaran	30	443,023,000
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	Bulan	12	139,634,472,266
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Fasilitas Kesehatan	Bulan	12	139,634,472,266

Samarinda, 03 Januari 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda



**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2022**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				388,754,153,548	352,305,989,578	90.62
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.53	96,135,627,590	86,090,834,022	89.55
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	Rasio	0.54			
Penyediaan Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Faskes	30	30,634,635,856	26,869,311,615	87.71
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	150,000,000	101,655,752	67.77
Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Yang Dibangun	Unit	1	8,971,455,000	8,863,222,940	98.79
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Gedung	69	453,630,000	416,390,000	91.79
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Paket	26	5,499,773,000	5,159,437,431	93.81
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	26	8,370,094,500	6,227,651,310	74.40
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	27	5,386,821,356	4,517,355,084	83.86
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Paket	26	540,000,000	534,167,098	98.92
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	26	181,862,000	174,847,000	96.14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	100	1,081,000,000	874,585,000	80.91
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jiwa	867.025	65,054,317,234	58,889,740,709	90.52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16.283	1,613,087,150	1,350,422,400	83.72

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15.541	251,271,000	216,511,916	86.17
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14.803	62,114,000	62,113,800	100.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	43.557	309,518,900	309,211,350	99.90
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	126.152	49,059,000	49,059,000	100.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	710.748	29,691,000	27,891,600	93.94
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	53.19	352,761,000	340,359,000	96.48
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	281.629	46,998,000	46,975,000	99.95
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	29.167	35,400,000	35,270,694	99.63
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1.182	25,943,000	25,645,000	98.85
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	8.3	23,640,000	23,640,000	100.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	15.583	17,920,000	17,920,000	100.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kelurahan	59	3,377,154,250	1,010,060,100	29.91
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak krisis kesehatan akibat bencana/atau berpotensi bencana	Kelurahan	59	132,952,500	98,893,378	74.38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah stunting yang tertangani tenaga kesehatan	Jiwa	2006	2,707,311,300	2,249,656,750	83.10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Puskesmas	26	46,010,000	43,799,800	95.20
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Air Minum berkualitas dan sanitasi	jumlah KK	191.142	200,000,000	195,724,138	97.86
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pelayanan promosi kesehatan	Kegiatan	33	60,111,000	60,111,000	100.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	jumlah pengumpulan data pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas registrasi/perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan yankestradkom	Puskesmas	28	26,039,300	25,974,900	99.75
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kelurahan yang dilakukan surveilan epidemiologi dan kewaspadaan dini	Kelurahan	59	1,585,828,000	1,585,482,800	99.98

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jiwa	1.182	35,235,000	35,178,500	99.84
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jiwa	1.182	1,672,877,393	1,649,600,348	98.61
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jiwa	576	18,662,000	18,422,000	98.71
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jiwa	96.108	62,285,000	62,173,000	99.82
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jiwa	38	40,159,776,927	37,947,075,442	94.49
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Tatanan yang diawasi dan menjadi Tatanan Sehat	Tatanan	7	159,350,000	159,086,562	99.83
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Bulan	12	49,976,000	47,136,986	94.32
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Bulan	12	8,383,458,364	7,694,918,877	91.79
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Palaran	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Palaran	Jiwa	41.85	74,187,000	74,187,000	100.00
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Mangkupalas	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas mangkupalas	Jiwa	30.503	140,000,000	139,075,000	99.34
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Baqa	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas baqa	Jiwa	36.431	96,570,850	96,570,850	100.00
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Harapan Baru	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas harapan baru	Jiwa	37.869	124,842,500	124,842,500	100.00
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Trauma Center	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Trauma Center	Jiwa	29.833	96,536,600	96,476,600	99.94
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Karang Asam	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas karang asam	Jiwa	33.944	128,376,900	128,376,900	100.00
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Loa Bakung	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas loa bakung	Jiwa	39.364	128,701,400	128,701,400	100.00
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Juanda	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas juanda	Jiwa	30.513	113,562,750	113,544,700	99.98
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Wonorejo	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas wonorejo	Jiwa	33.269	92,454,750	79,284,750	85.76
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Pasundan	Tersedianya masyarakat yang terlayani di Puskesmas pasundan	Jiwa	27.038	130,448,250	130,448,150	100.00
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Segiri	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas segiri	Jiwa	39.888	88,856,900	88,850,400	99.99
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Air Putih	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas air putih	Jiwa	41.472	107,702,000	104,184,000	96.73
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Remaja	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Remaja	Jiwa	38.547	111,899,450	111,721,176	99.84
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Temindung	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmasn temindung	Jiwa	72.218	116,181,500	113,989,744	98.11
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sidomulyo	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sidomulyo	Jiwa	74.331	112,286,500	108,130,300	96.30
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sambutan	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sambutan	Jiwa	26.558	113,491,300	113,242,750	99.78
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Kapih	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sungai kapih	Jiwa	14.604	121,674,250	121,644,250	99.98
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Makroman	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas makroman	Jiwa	17.103	118,231,000	118,231,000	100.00
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lempake	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas lempake	Jiwa	21.154	99,872,700	99,860,700	99.99
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sungai Siring	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas sungai siring	Jiwa	17.214	132,929,000	132,829,000	99.92
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bukuan	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bukuan	Jiwa	17.83	126,285,000	126,284,900	100.00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bantuas	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bantuas	Jiwa	4.675	123,619,800	104,419,800	84.47
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Bengkuring	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas bengkuring	Jiwa	46.946	116,576,750	116,576,750	100.00
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Lok Bahu	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas lok bahu	Jiwa	29.559	64,500,000	64,499,050	100.00
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Sempaja	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas jalan sempaja	Jiwa	21.88	119,652,350	116,044,350	96.98
Operasional Pelayanan Untuk Puskesmas Samarinda Kota	Jumlah masyarakat yang terlayani di Puskesmas Samarinda Kota	Jiwa	35.445	99,562,100	99,562,100	100.00
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah biaya operasional fasilitas kesehatan lainnya	Unit	6	418,878,350	409,029,298	97.65
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan Primer Yang Ter-akreditasi	Puskesmas	33	177,748,200	176,732,950	99.43
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Kelurahan	59	31,963,000	31,926,000	99.88
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Kewaspadaan Dini dan respon wabah	Kelurahan	59	32,296,000	32,160,000	99.58
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Faskes Terintegrasi dalam sistem Informasi Kesehatan	Faskes	30	103,958,500	103,666,405	99.72
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan & data informasi kesehatan	Puskesmas	26	62,932,500	62,670,905	99.58
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang melaporkan melalui SIKDA	Puskesmas	26	41,026,000	40,995,500	99.93
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Jumlah Izin Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit	15	342,716,000	228,115,293	66.56
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	13	46,425,000	29,070,000	62.62
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di Bina	Rumah Sakit	13	274,916,000	182,020,293	66.21
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Rumusan Rujukan	Dokumen	10	21,375,000	17,025,000	79.65
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Persentase	20	2,148,913,500	2,146,407,238	99.88
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan yang Kompeten untuk UKP dan UKM	Orang	200	2,148,913,500	2,146,407,238	99.88
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar	Orang	677	2,148,913,500	2,146,407,238	99.88
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tersedianya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan yang terjamin aman, berkhasiat dan bermutu serta terjamin ketersediaan dan keterjangkauannya	Persentase	100	241,800,000	195,150,500	80.71

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
	Persentase Rekomendasi yang diberikan pada seluruh sarana Tempat Pengolahan Pangan (TPP)	Persentase	15,92			
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Izin yang dikeluarkan	Sertifikat	50	13,258,000	-	-
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan ke Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitas Kesehatan	50	13,258,000	-	-
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Rumah Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	unit	1300	121,390,000	121,390,000	100.00
Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi, mendapat sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikat Industri Rumah Rangka Pangan (SPP-IRT)	unit	1300	121,390,000	121,390,000	100.00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang diperiksa dan Diawasi	Unit	100	107,152,000	73,760,500	68.84
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk Industri Rumah Tangga Pangan yang diawasi dan diperiksa	Unit	100	107,152,000	73,760,500	68.84
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Murunnya Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular	Persentase	11,5	2,029,052,250	1,890,785,185	93.19
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	Laporan	1	1,838,695,250	1,701,091,350	92.52
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan	Laporan	1	1,838,695,250	1,701,091,350	92.52
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	Kegiatan	17	62,694,000	62,693,900	100.00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan sehat	Kegiatan	17	62,694,000	62,693,900	100.00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	Bimtek	2	127,663,000	126,999,935	99.48

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimbingan Teknis, Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Sehat	Bimtek	2	127,663,000	126,999,935	99.48
	Nilai IKM	Nilai	78.2	288,198,760,208		-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	Nilai	78.2	288,198,760,208	261,982,812,633	90.90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Nilai	7,2	74,250,600	74,250,350	100.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	5	33,977,600	33,977,450	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LAKIP	Dokumen	1	40,273,000	40,272,900	100.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	7	140,906,959,742	139,796,867,568	99.21
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Orang	1057	123,605,625,742	122,520,122,804	99.12
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	Orang	888	17,266,636,000	17,242,673,864	99.86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	Laporan	7	34,698,000	34,070,900	98.19
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	Laporan	8	868,092,950	638,730,774	73.58
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	2	5,998,000	5,981,675	99.73
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	2	688,145,000	463,296,843	67.33
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Buah	20	8,500,000	8,452,000	99.44
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	Paket	20	30,900,100	26,467,675	85.66
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Dokumen	10	19,899,850	19,899,800	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku	2	16,050,000	16,033,200	99.90
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	Dokumen	39	98,600,000	98,599,581	100.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	laporan	158	120,000,000	13,400,000	11.17
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Unit	50	120,000,000	13,400,000	11.17
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	2	5,722,779,900	3,867,782,823	67.59
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang Dibayarkan	Bukti Pembayaran	87	5,612,200,000	3,821,586,373	68.09
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bukti Pembayaran	2	110,579,900	46,196,450	41.78
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	Laporan	5	872,204,750	655,657,978	75.17

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Bukti Pembayaran	345	44,975,000	44,077,500	98.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	Bukti Pembayaran	345	149,848,750	118,043,328	78.77
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tagihan pemeliharaan peralatan mesin	Bukti Pembayaran	150	234,358,000	53,680,000	22.91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tagihan pemeliharaan/rehabilitasi gedung	Bukti Pembayaran	30	443,023,000	439,857,150	99.29
Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Rumah Sakit & Puskesmas	Bulan	12	139,634,472,266	116,936,123,140	83.74
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya Operasional BLUD Fasilitas Kesehatan	Bulan	12	139,634,472,266	116,936,123,140	83.74

Samarinda, 01 Februari 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196909111998031009